

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisis Bagaimana respon kebijakan perdagangan internasional pemerintah Indonesia terkait dengan adanya perang dagang China dan Amerika Serikat tahun 2018–2020. Serta mengimplementasikan dari teori liberalisme yang akan dikaitkan dengan studi kasus dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Liberalisme sebagai teori menyelidiki konsep kebebasan, kerja sama, perdamaian, dan kemajuan sebagai elemen sentralnya. Teori ini menekankan pentingnya menghormati kebebasan individu dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan yang bersama-sama. Melalui kerja sama dan saling ketergantungan, perang dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional, dan upaya untuk mencegah konflik dipromosikan (Dugis, 2016). Analisis yang akan dibahas oleh penulis bagaimana respon pemerintah Indonesia dengan kebijakan yang diterapkan Amerika Serikat dan apa instrumen yang terkait seperti kekuatan politik dalam negeri dan instrumental yang ada di luar wilayah. Dengan menggunakan teori liberalisme dalam permasalahan perang dagang antara AS dan China melihat melalui segi kerja sama yang dijalin oleh Indonesia. Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China dianggap sebagai salah satu hubungan paling signifikan di dunia. Kedua negara ini memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat dan sering disebut sebagai "kekuatan adidaya". Keanggotaan China dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menjadi strategi untuk meningkatkan kerja sama dagang antara kedua negara.

Melalui teori liberalisme penelitian mengkaitkan dengan konsep interdependensi diplomasi ekonomi serta kebijakan perdagangan internasional. Dengan menggunakan konsep interdependensi menjelaskan bagaimana ketergantungan satu negara terhadap peran memiliki sifat bergantung kepentingan bersama terhadap negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya, setiap negara akan bergantung kepada sumber daya yang dimiliki oleh masing-

masing negara. Sehingga dapat dilihat bagaimana Indonesia menjalin kerja sama dengan AS dan China melalui pasar internasional ekspor dan impor serta menggunakan konsep diplomasi ekonomi. Konsep kebijakan perdagangan internasional digunakan untuk membahas kebijakan yang dibuat Presiden Donald Trump terhadap China.

Terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat dengan membuat kebijakan mengenai perdagangan China dalam kampanye politiknya menjadi awal mula terjadinya konflik perang dagang kedua negara adidaya tersebut. Seperti yang diketahui Amerika Serikat dan China menjalin kerja sama yang baik dengan Indonesia dengan adanya perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan China yang berawal pada tahun 2018 sehingga beberapa negara terkena dampak dari peperangan tersebut. Bagaimana kebijakan perdagangan internasional dan seperti apa instrumental diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi rekan diplomasi yang sedang mengalami konflik perang dagang. Pendekatan baru Amerika Serikat yang berfokus pada defisit perdagangan barang, yang menargetkan terutama China serta negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengatasi kekhawatiran nyata AS mengenai perdagangan tidak adil, seperti transfer teknologi, subsidi industri dan perdagangan dan distorsi investasi. Perang dagang Amerika Serikat dan China menciptakan ketidakpastian bagi pertumbuhan global dan khususnya penurunan pertumbuhan China kemungkinan akan melanda Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengingat China telah menjadi mitra dagang nomor satu mereka.

4.1 Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat dengan China

Neraca perdagangan Amerika Serikat menghadapi ketimpangan yang diakibatkan oleh meningkatnya ekspor Cina ke Amerika Serikat pada tahun 2018. Dimana perihal tersebut menjadi suatu akibat yang dirasakan oleh China akibat dari terdapatnya krisis ekonomi global terjalin pada Amerika Serikat serta negara-negara Eropa. Akibat krisis ekonomi global tersebut pengaruhi jumlah penanaman modal asing yang masuk ke China sebab banyak perusahaan paling utama industri Amerika Serikat, baik skala besar ataupun kecil yang menutup pabriknya di China semacam General Motor. Tidak hanya itu pemerintah Amerika Serikat pula melaksanakan kenaikan anggaran pertahanannya sehabis serbuan teroris serta jadi lebih besar lagi dengan

terdapatnya serbuan ke Afganistan serta Irak oleh Amerika Serikat (Ardhani, 2019). Hubungan Amerika Serikat dengan China telah berlangsung sangat lama. Di mana diawali semenjak China mulai membuka ruang ekonomi negara sehingga Amerika Serikat mulai masuk ke dalam siklus perdagangan China hingga menjalin hubungan kedua negara menjadi baik. Dalam menjalin hubungan bilateral kedua negara saling melakukan kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan politik, ekonomi dan sosial (Ardhani, 2019).

Xi Jinping (Presiden China) melakukan pertemuan dengan Donald Trump (Presiden USA) pada 7 April 2017 untuk menjalin persahabatan kedua negara. Pada pertemuan tersebut, rencana 100 hari untuk melakukan negosiasi perdagangan disetujui oleh Presiden Xi Jinping dengan tujuan meningkatkan ekspor Amerika Serikat dan mengurangi defisit dagang antara kedua negara. Selain itu, terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara. Setelah pertemuan tersebut, Donald Trump mengonfirmasi kepada *The Wall Street Journal* bahwa ia tidak akan menyebut China sebagai manipulator mata uang berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Sebagai alternatif, Trump memerintahkan perwakilan perdagangan Amerika Serikat untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan dan praktik China yang terkait dengan transfer teknologi, kekayaan intelektual, dan inovasi melalui 'Section 301' (Sebayang, 2019).

Namun, dibalik hubungan yang dijalankan oleh Amerika dan China sering kali mengalami konflik antaranya yaitu perang dagang yang bermula pada tahun 2018 ketika masa pemerintahan baru dibawah Donald Trump, yang di mana trump tengah mengalami keresahan terhadap defisit neraca perdagangan yang mengalami peningkatan terhadap China. Pada tanggal 22 Januari 2018, Presiden Trump mengeluarkan pengumuman mengenai penerapan tarif impor untuk sel surya, yang memicu kekhawatiran di kalangan bisnis dan pasar keuangan serta mendukung kebijakan perang dagang dengan China. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Donald Trump melalui cuitan di akun Twitter pada tanggal 2 Maret 2018 (Sebayang, 2019). Pada tanggal 8 Maret 2018, terjadi eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China ketika Presiden Trump mengumumkan niatnya untuk memberlakukan tarif pada produk impor dari China (Sri, 2019). Terjadi pemberlakuan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat dengan besaran sekitar US\$50-US\$60 miliar pada beberapa produk China yang diimpor ke negara tersebut. Selain itu, tarif impor untuk baja dinaikkan menjadi 25% dan aluminium menjadi 10%

sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian dan mengurangi defisit neraca perdagangan antara kedua negara. Namun keputusan pengenaan tarif impor ini telah diberlakukan untuk seluruh negara kecuali Kanada dan Meksiko (Pujayanti, 2018, hal. 7).

Pada tanggal 22 Maret 2018, diumumkan bahwa Donald Trump berkeinginan untuk menerapkan tarif, menyelesaikan perselisihan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan membatasi investasi dari China. Sebagai respons terhadap langkah tersebut, China meningkatkan tarif sebesar 25% untuk produk daging babi dan aluminium. Pada tanggal 1 April 2018, Beijing juga memberlakukan tarif sebesar 15% untuk komoditas Amerika Serikat seperti almond dan apel. Dua hari setelah China mengumumkan kenaikan tarif tersebut, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat merilis daftar tarif yang diusulkan untuk impor dari China dengan nilai sekitar \$50 miliar, termasuk produk yang digunakan dalam bidang robotika, teknologi informasi, dan komunikasi. Diperkirakan ada sekitar 1.300 produk yang terdaftar. Sebagai tanggapan, Kantor Perwakilan Perdagangan China juga merilis daftar barang yang akan dikenakan tarif, termasuk 106 produk Amerika Serikat seperti kacang kedelai, daging sapi, jagung, serta beberapa pesawat terbang dan kendaraan, dengan total nilai sekitar \$100 miliar. Hal tersebut sedikit memberatkan Amerika Serikat sehingga Trump meminta pertimbangan tarif tambahan senilai \$100 miliar terhadap China, namun China tidak mendengarkan permintaan Amerika Serikat justru mengajukan keluhan terhadap WTO atas tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat untuk impor baja dan aluminium. Tindakan yang diambil China terhadap Amerika Serikat tidak diterima dengan baik, yang mengakibatkan Departemen Perdagangan Amerika Serikat melarang perusahaan telekomunikasi China, ZTE, untuk membeli komponen dari Amerika Serikat selama tujuh tahun. Tindakan ini diambil sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yaitu melakukan pengiriman ilegal ke Iran dan Korea Utara pada tanggal 16 April 2018. Kedua negara saling melakukan serangan balik, dan pada tanggal 3 Mei 2018, delegasi dari Amerika Serikat dan China mengadakan putaran pembicaraan perdagangan di Beijing. Sayangnya, pembicaraan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian untuk perselisihan yang mereka hadapi. Namun perundingan yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan terhadap kedua belah pihak (Sebayang, 2019)

Dampak dari konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan

ekonomi mengalami kenaikan sebesar 73,67%. Namun, pada tahun 2019, ketika perang dagang terjadi, terjadi penurunan sebesar 71,41% (Sari, Marselina, & Aida, 2021). Tujuan Donald Trump mengarahkan perekonomian Amerika Serikat kepada proteksi upaya untuk memperbaiki inflasi perdagangan Amerika Serikat (Pujayanti, 2018, hal. 7). Langkah-langkah tambahan telah diambil oleh Amerika Serikat selain menerapkan tarif impor, yaitu membatasi investasi dan memulai tindakan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terhadap China. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap dugaan ketidakadilan dalam perdagangan bilateral antara kedua negara. (Pujayanti, 2018, hal. 7). Kebijakan pemberlakuan tarif impor terhadap produk-produk dari China dipandang sebagai langkah yang sangat penting bagi perkembangan sektor industri Amerika Serikat di masa mendatang. Pemerintah Amerika Serikat akan terus memberikan tekanan kepada China untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi pelaku bisnis Amerika Serikat, serta mengurangi sedikit defisit perdagangan dan menghilangkan persyaratan yang mengharuskan perusahaan asing membentuk joint venture dengan perusahaan China (Pujayanti, 2018, hal. 8).

Tidak hanya bertindak diam, pemerintah China mengumumkan pada tanggal 18 Mei 2018 bahwa mereka akan menghentikan penyidikan terhadap impor sorgum dari Amerika Serikat dalam rangka menghindari tindakan anti-dumping. Selain itu, kedua negara mencapai kesepakatan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian dan energi dari Amerika Serikat serta meningkatkan volume impor barang dan layanan secara signifikan. Namun, sebagai respons terhadap langkah-langkah Amerika Serikat, China juga meningkatkan tarif impor hingga 25% terhadap produk impor dari Amerika Serikat dan mereka berencana untuk melaporkan permasalahan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Pujayanti, 2018, hal. 8). China menegaskan kebijakan baru tarif Amerika Serikat melanggar konsensus yang dibuat pemimpin kedua negara di Osaka, China mempertahankan hak hukumnya sesuai dengan aturan WTO (Pransuamitra, 2019). Seiring menjelang kunjungan Menteri Perdagangan Wilbur Ross, China mengumumkan niatnya untuk mengurangi tarif pada sekitar 1.449 produk mulai 1 Juli. Namun, sebagian besar produk tersebut tidak relevan bagi Amerika Serikat saat kunjungan kedua belah pihak pada 31 Mei 2018. Pada 4 Juni 2018, kedua negara kembali berdiskusi tentang mengurangi defisit Amerika Serikat dengan meningkatkan pasokan produk pertanian dan energi ke China, serta mencapai kesepakatan untuk saling mendaftar produk yang akan dikenakan tarif. Meskipun demikian, pemerintah Amerika Serikat meminta agar lebih banyak produk China yang dikenakan

tarif impor karena kekhawatiran Trump mengenai banjirnya produk China di pasar Amerika Serikat. Namun, permintaan pemerintah Amerika Serikat tidak diterima dan sebagai respons, Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 10% untuk barang-barang impor dari China senilai US\$ 200 miliar. Rencananya adalah meningkatkan tarif tersebut menjadi 25% pada awal tahun 2019. Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar US\$ 267 miliar pada produk-produk China jika Beijing membalas tindakan tersebut. Sebagai respons terhadap tindakan Amerika Serikat, pemerintah China tidak tinggal diam dan mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif impor sebesar \$60 miliar pada produk-produk AS (Sebayang, 2019)

Pada awal tahun 2019, Amerika Serikat mengirim delegasi ke Beijing untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan dengan China. Setelah melihat adanya "kemajuan substansial" dalam putaran pembicaraan perdagangan terbaru antara Amerika Serikat dan China, Donald Trump memutuskan untuk menunda rencananya untuk meningkatkan tarif pada barang-barang impor China senilai US\$ 200 miliar dari 10% menjadi 25%. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengungkapkan bahwa kedua negara mencapai kemajuan dalam kesepakatan perdagangan, termasuk penyelesaian masalah penting terkait penegakan hukum yang sebelumnya menjadi hambatan. Pada 5 Mei 2019, Amerika Serikat secara efektif menerapkan kenaikan tarif sebesar 25% dari tarif awal 10% terhadap 5.700 kategori produk yang berbeda dari China (Sri, 2019). Trump juga mengeluarkan peringatan terhadap perusahaan Amerika Serikat yang melakukan investasi terhadap China untuk menarik dan kembali ke Amerika Serikat agar tidak terkena dampak dari perang dagang (Aipassa, 2019). Donald trump tidak segan segan mengangkat bendera perangnya dengan membuat update di *Twitter*, yang menjelaskan mengenai bagaimana Amerika Serikat tidak membutuhkan China dan akan lebih baik tanpa China. Sehingga membuat para pebisnis yang berinvestasi di China merasa panik dan mengkhawatirkan pabrik yang beroperasi di China. Perang antar dua negara lanjut pada putaran kedua yang belum terlihat tanda akan berakhir hingga awal tahun 2020. Perang dagang yang terjadi menjadi suatu peristiwa yang cukup besar dalam pasar global yang menimbulkan dampak negatif bagi beberapa sektor dagang internasional yang menyebabkan penurunan ekonomi global. Perang dagang Amerika dan China menimbulkan pengaruh besar terhadap perekonomian global dan termasuk terhadap negara Indonesia. Ekonomi dunia mengalami kemerosotan pendapat sejak terjadinya perang dagang Amerika dan China yang merupakan dua negara mitra bagi Indonesia dalam

melakukan kerja sama (Aprilianti, 2019). Pada tingkat Global Perang dagang yang terjadi terhadap dua negara sangat berpengaruh terhadap pelemahan ekonomi dunia dan berimplikasi terhadap Indonesia (Pujayanti, 2018).

Kedua negara, Amerika Serikat dan China, memiliki hubungan dagang yang kuat dalam hal ekspor dan impor. Data dari UN Comtrade Database menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan China mencatatkan nilai ekspor yang signifikan sebesar US\$ 787,67 juta per tahun dari tiga komoditas utama, yaitu daging babi, buah dan kacang, serta wine (Sri, 2019). Nilai ekspor Amerika Serikat ke China mencapai US\$ 378,4 juta per tahun, dengan buah dan kacang-kacangan sebagai produk utama yang diekspor. Jumlah ekspor ini melebihi nilai ekspor Amerika Serikat ke Indonesia yang hanya sebesar US\$ 101,34 juta per tahun. Sementara itu, China mengimpor produk ke Amerika Serikat dengan nilai mencapai US\$ 47.040,16 juta per tahun, termasuk perangkat telekomunikasi, bahan baku pesawat, dan besi. Ekspor komoditas ini mencapai US\$ 45.879,42 juta per tahun (Sri, 2019). Terlihat bahwa nilai ekspor Amerika Serikat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan China. Pada awal tahun 2018, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat mencapai US\$ 56,6 Miliar. (Sri, 2019). Donald Trump merasa perlu melakukan evaluasi terhadap tarif bea masuk untuk produk impor dari China akibat situasi tersebut. Aksi serangan Amerika terhadap China bertindak untuk menyerang balik Amerika Serikat dengan tetap memperhitungkan agar terhindar dari langkah yang akan membuat kerugian yang cukup banyak terhadap bisnis dalam negeri maupun asing yang ada di china (Sebayang, 2018). Kekhawatiran tentang perang dagang berdampak negatif terhadap ekonomi China dan menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan penjualan kendaraan. Hal ini sangat mengganggu China sebagai negara dengan pasar otomotif terbesar di dunia, karena akan sulit untuk mencapai pertumbuhan penjualan kendaraan yang signifikan. Perihal tersebut China akan melakukan penyerangan balik terhadap Amerika Serikat melalui penarikan tarif bea masuk barang Amerika Serikat yang masuk pasar lokal (impor) sebesar \$60 miliar dan kebijakan tersebut berlaku pada 1 Juni 2019 ribuan produk target termasuk kacang, gula, gandum, ayam dan kalkun (Sinintya, 2019)

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berlangsung hampir dua tahun tanpa tanda-tanda reda. Pada tanggal 1 September 2019, Amerika Serikat secara resmi menerapkan kenaikan tarif tahap pertama sebesar 15% untuk barang-barang senilai \$300 miliar

yang berasal dari China. Sebagai tanggapan, China juga mulai memberlakukan tarif tambahan pada barang-barang Amerika Serikat senilai \$75 miliar, yang mencakup 1.717 produk dengan tarif 5% dan 10%. Amerika Serikat berencana meningkatkan tarif impor China sebesar 30% dari 25% yang telah diberlakukan sebelumnya untuk impor senilai \$250 miliar pada tanggal 1 Oktober. Hal ini telah menyebabkan gejolak yang signifikan di pasar saham. Tarif-tarif tersebut memaksa kedua negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi keuntungan dalam berbisnis (Mangkuto W. S., 2019)

4.2 Pengaruh/dampak perang dagang AS-RRT terhadap Indonesia

Masuknya China ke dalam WTO memberi dampak yang cukup positif bagi perekonomian China. Keuntungan perdagangan yang semakin besar berdampak untuk memperkuat perekonomian China sehingga China mampu mengintegrasikan ekonominya ke dalam WTO. Dengan bergabungnya China dengan organisasi besar di dunia maka pintu perdagangan China semakin terbuka luas. Pemerintah China berharap akan nilai ekspor yang meningkat dan meluasnya nilai investasi asing dari sesama anggota WTO yang mau membuka bisnisnya di China.

Neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami ketimpangan yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya ekspor China ke Amerika Serikat pada tahun 2008. Dimana hal tersebut merupakan salah satu dampak yang dialami oleh China akibat dari adanya krisis ekonomi global terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dampak krisis ekonomi global tersebut mempengaruhi jumlah penanaman modal asing yang masuk ke China karena banyak perusahaan terutama perusahaan Amerika Serikat, baik skala besar maupun kecil yang menutup pabriknya di China seperti General Motor.

Krisis ekonomi yang mulai terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah mengguncang banyak pihak termasuk masyarakat di berbagai negara. Hal ini sangat mengejutkan karena Amerika Serikat sebagai negara besar dan kuat secara ekonomi, pada akhirnya juga mengalami krisis ekonomi yang menumbangkan bursa saham dan keuangan Amerika Serikat serta berbagai negara di dunia lainnya.

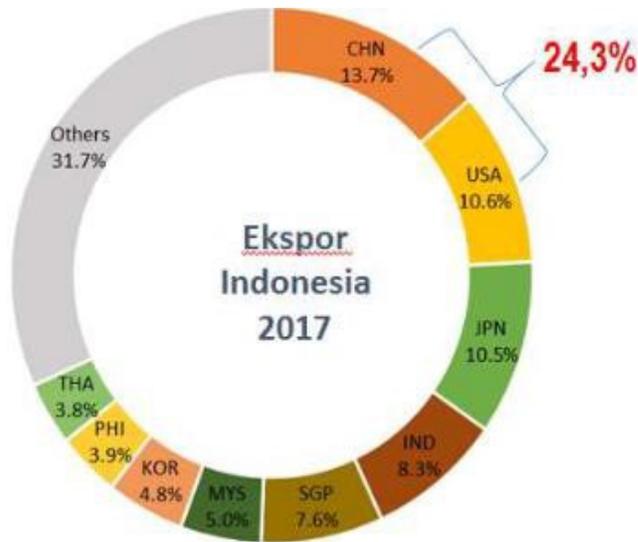
Meningkatnya perekonomian China memberikan tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat. Kerja sama di bidang perekonomian antara Amerika Serikat dan China terutama di kegiatan ekspor dan impor mengalami peningkatan. Tren tersebut sebenarnya telah terjadi sekitar tahun 2002. Pada saat itu, total ekspor China ke Amerika Serikat lebih besar yaitu sejumlah \$125 miliar, daripada total ekspor Amerika Serikat ke China yang hanya sejumlah \$19 miliar. Salah satu alasan jumlah ekspor China ke Amerika Serikat lebih besar adalah masyarakat AS lebih konsumtif daripada masyarakat China. Masyarakat China yang dibayar rendah tidak mampu membeli barang produksi AS yang berharga tinggi. Pada intinya adalah daya beli masyarakat China rendah sehingga permintaan terhadap barang produksi AS menurun, kemudian berdampak pada jumlah ekspor dan impor di kedua negara. Faktor lain yang menyebabkan total ekspor China ke AS lebih besar adalah pertukaran nilai mata uang. Pemerintah China menerapkan kurs tetap yang membuat nilai mata uang Yuan China lebih rendah terhadap Dollar Amerika.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (Cina) dimulai saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan bea Impor panel surya dan mesin cuci sebesar 30 persen dan 20 persen pada 22 Januari 2018. Sejak saat itu secara bertahap terjadi kenaikan bea impor barang-barang Cina yang masuk ke Amerika Serikat.

Cina pun tak tinggal diam, ia juga menaikkan tarif untuk beberapa komoditi seperti olahan daging babi dan scrap aluminium. Selain itu Cina juga melaporkan kepada WTO terkait bea impor baja dan aluminium pada April 2018. Dengan berbagai kebijakan ini, pada Mei 2018 diselenggarakan pertemuan antara Cina dan Amerika Serikat di Beijing. Tetapi, hasil pertemuan pun tidak menemukan titik terang dari permasalahan mereka. Perseteruan yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat ini bisa menjadi peluang dan ancaman bagi perekonomian Indonesia. Cina menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke Cina sebagian besar disumbangkan oleh komoditas mentah seperti mineral (besi atau baja) yang merupakan bahan dasar dalam industri elektronik. Industri elektronik sendiri merupakan salah satu komoditas yang dikenai bea cukai cukup tinggi oleh Amerika Serikat. Jika terjadi penurunan penjualan, tentu berimbas pada ekspor Indonesia terhadap Cina terutama terhadap industri tekstil Indonesia.

Hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak bisa dianggap remeh, hal ini karena kedua negara tersebut adalah mitra dagang terbesar di Indonesia.

Berikut adalah aliran ekspor barang Indonesia tahun 2017 yang mendukung intensnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok seperti tersaji dalam grafik



Sumber: Trademap (diolah Kemendag)

Dari grafik 4.3 dapat dilihat bahwa aliran ekspor barang Indonesia tahun 2017 terhadap Tiongkok adalah sebesar 13,7 persen dan terhadap Amerika Serikat adalah sebesar 10,6 persen. Jika ditotal dari kedua negara yang tengah berperang dagang yaitu sebesar 24,3 persen dari total perdagangan dunia.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok adalah mitra dagang terbesar di Indonesia.

Kebijakan Amerika Serikat dengan meningkatkan restriksi impor untuk menekan defisit perdagangan dengan China banyak memancing reaksi negara- negara yang memiliki hubungan dagang. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China meningkat dari USD 371,8 miliar pada 2016 menjadi US\$ 395,8 miliar pada 2017. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar US \$ 50-US \$ 60 miliar untuk sejumlah produk China yang masuk ke Amerika dalam upaya memperbaiki perekonomian dalam negeri dan mengurangi defisit neraca perdagangan kedua negara. Presiden Trump mengumumkan menaikkan tarif impor hingga 15% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Selain pengenaan tarif impor, Amerika Serikat juga berencana untuk membatasi investasi dan mengambil tindakan untuk China di

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena menganggap negara tersebut bersikap tidak adil dalam perdagangan bilateral.

Dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China menyebabkan peningkatan harga barang di China dan Amerika Serikat, terjadinya trade diversion yang membuka kran ekspor bagi negara ketiga (satelit) untuk mengisi pasar. Dampak lainnya, mengurangi permintaan bahan baku impor di Tiongkok dan Amerika Serikat khususnya bahan baku untuk barang-barang ekspor. Melihat kebijakan yang diambil oleh Amerika, pemerintah China juga melakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi luar negeri, yaitu dengan menaikkan tarif impor hingga 25% terhadap produk impor Amerika Serikat dan membawa masalah tersebut ke WTO. China menaikkan bea masuk produk asal Amerika senilai US \$ 60 miliar. Bahkan, China juga menambahkan tarif impor terhadap 128 produk Amerika Serikat senilai USD 3 miliar dengan rincian 120 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 15%, dan 8 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 25%.

Ketegangan hubungan antara Amerika dan Cina tentu berangkat dari kedua negara ini masing-masing mempertahankan posisinya sebagai negara super power ekonomi di dunia. Amerika sebagai negara adidaya merasa posisinya terancam oleh kehadiran Cina. Perang dagang kedua negara ini sangat jelas mengganggu perekonomian dunia terutama Indonesia. Konkritnya, salah satu di antara dampaknya karena selama ini Indonesia masih bergantung pada kerjasama multilateral dan sudah pasti akan kesulitan mencari mitra ekonomi dan investasi. Berpijak dari hal di atas, maka perang dagang negeri Paman Sam dan Negeri Tirai Bambu secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap perkenomian Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah ekspor yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan.

Dampak pertama adalah ekspor Indonesia tertekan, perang daging yang terjadi dapat mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Sebab ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia selaku eksportir bahan baku. Salah satu jenis Ekspor yang terdampak dari perang dagang antara Amerika dan cina ini adalah ekspor sawit. Padahal ekspor sawit ini produk unggulan dari Indonesia. Penurunan tersebut sangat jelas dibandingkan tahun lalu dimana ekspor sawit menurun hingga 17 persen. Karena hal ini terjadi kedua negara tersebut memperketat kebijakan untuk negaranya. Contohnya, seperti Amerika

yang menaikkan bea masuk produk biodiesel. Selain itu terhambatnya ekspor logam Indonesia juga memengaruhi turunya laju pertumbuhan ekonomi RI. Selama ini, Indonesia banyak mengekspor aluminium, besi, dan baja ke Amerika. Pada tahun 2017 keuntungan yang diraup dari baja dan aluminium sebesar US\$19 juta dan US\$70 juta.

Dampak perang dagang Selanjutnya antara Amerika dan Cina dapat mengancam pasar modal dimana Setelah AS menaikkan bea impor terhadap barang-barang Cina senilai US\$200 miliar, Cina membalas menaikkan bea masuk produk asal Negeri Paman Sam senilai US\$ 60 miliar dimana hal ini berdampak kepada Indonesia pada tahun 2018 mulai lebih terasa dimana nilai IHSG Indonesia melemah pada level 6.194,50 dan harga ekspor minyak kelapa sawit menjadi 556 dolar Amerika per ton dan 88,3 dolar per ton untuk ekspor batu bara.

Walau dampak dari perang dagang dan perlambatan perekonomian dunia mulai merambat ke dalam perekonomian, pasar modal Indonesia mencatat peningkatan secara signifikan pada tahun tersebut dimana BEI mencatat pertumbuhan SID (single id investor) sebanyak 200.935 SID sepanjang tahun 2018 dengan penambahan 1500 investor baru setiap hari. Hal ini didorong juga oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas lokal dan UMKM yang menyebabkan perekonomian Indonesia meningkat menjadi 5,18 persen pada kuartal IV tahun tersebut (BI, 2017). Pada gambar 2 dapat dilihat bagaimana kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tahun 2010 - 2020. UMKM berkontribusi kurang lebih 57 persen terhadap PDB Indonesia dari tahun 2011 – 2018. Lalu pada tahun 2019 UMKM berkontribusi sebesar 60,3 persen.

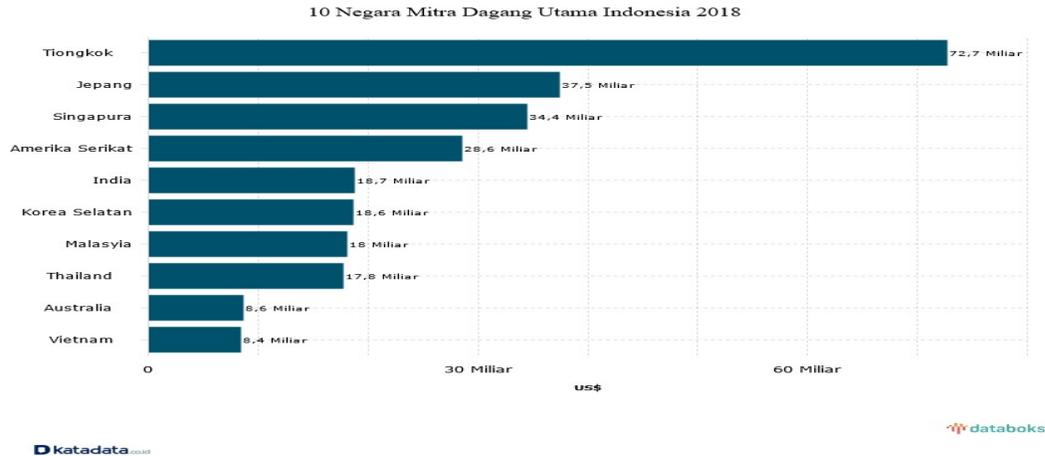
Tahun 2019 merupakan puncak dari perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dimana dampak yang dihasilkan dari perlambatan ekonomi dunia mulai menyebar ke seluruh negara. Nilai komoditas bahan baku yang menjadi objek ekspor untuk AS dan Tiongkok mengalami penurunan secara signifikan seperti harga minyak kelapa sawit yang pada tahun 2018 bernilai 556 dolar Amerika per ton turun menjadi 500 dolar Amerika per ton dan harga batu bara yang semula bernilai 88,3 dolar Amerika per ton turun menjadi 65 dolar Amerika per ton. Nilai IHSG Indonesia selama 2019 kembali menguat 1,69 persen menjadi level 6,299 persen dengan sektor industri mengalami penurunan terbanyak pada akhir 2019 dengan penurunan sebesar 1,6 persen. Jumlah investor pada pasar modal Indonesia meningkat sebanyak 53 persen menjadi 2,48 juta investor lokal. Dengan adanya dorongan pemerintah terhadap industri lokal dan UMKM

juga meningkatnya investor lokal terhadap pasar modal tidak menjamin peningkatan dalam perekonomian karena pada tahun 2019, nilai perekonomian Indonesia berada pada level 5,02 persen atau turun sekitar 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

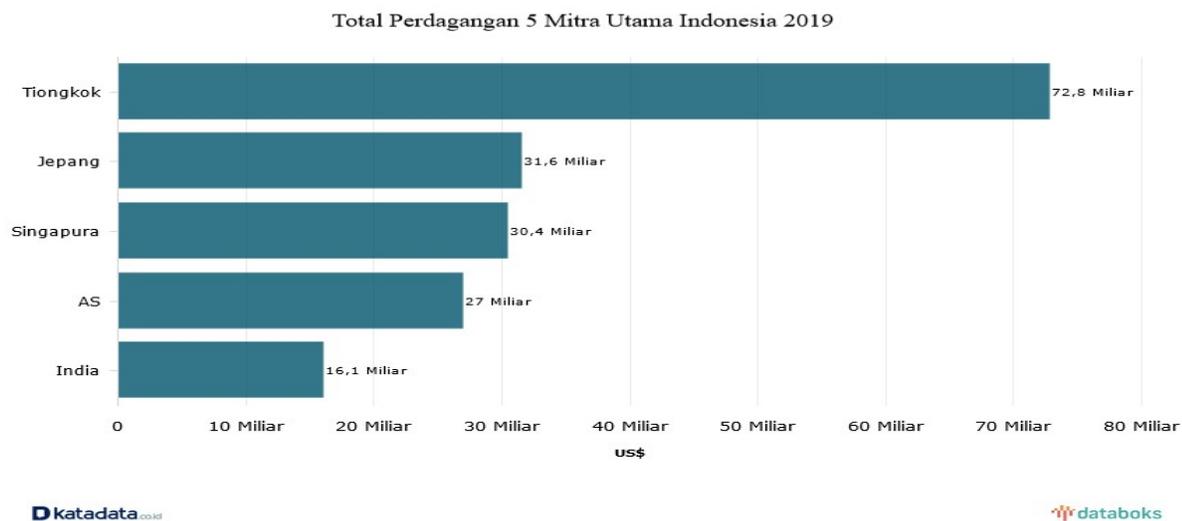
Penyebab turunnya nilai perekonomian Indonesia merupakan dampak dari perang dagang itu sendiri yang sudah merambat ke negara lain sehingga melemahkan dan melambatkan perekonomian terhadap 70 negara tujuan ekspor Indonesia yang berpengaruh terhadap harga komoditas dan neraca perdagangan Indonesia. Turunnya IHSG dalam sektor industri juga berdampak pada turunnya perekonomian Indonesia dimana hasil industri lokal pada tahun tersebut tidak optimal karena mahalnya bahan baku impor dan hasil industri dengan harga ekspor yang tidak sebanding dengan kebutuhan bahan impor tersebut. Walau sektor ekspor dan impor mengalami penurunan signifikan, Indonesia tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen dan menjaga inflasi negara tetap dibawah 3,5 persen. Dengan demikian pengaruh kebijakan proteksi yang memicu perang dagang memberi dampak yang cukup signifikan sekalipun Indonesia tetap dapat memajukan perekonomian tanpa terpengaruh dengan perlambatan ekonomi dunia dari tahun ke tahun semenjak kebijakan tersebut ditetapkan.

4.3 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat dan China dalam Mitra Perdagangan

Sebagai sebuah negara, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan China sebagai keuntungan. Kedua negara tersebut merupakan kekuatan besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian global. Selain itu, Amerika Serikat dan China juga merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, menjadi tujuan ekspor utama yang berkontribusi pada total perdagangan negara ini. Amerika Serikat negara adidaya yang pertama diakui dunia dengan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki perekonomian dinamis dan kekuatan militer. Seiring berjalannya waktu China mampu bersaing dengan Amerika Serikat dan menjadi negara adidaya kedua. Perubahan China yang mampu memperkuat ekonominya serta memiliki rakyat dengan jumlah yang banyak mendapatkan pengakuan dari dunia.



Grafik 2018



Grafik 2019

Sumber: databoks.katadata.co.id diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/25/nilai-perdagangan-5-negara-mitra-terbesar-indonesia> pada 20 November 2020

Melihat dari grafik di atas mengenai mitra perdagangan Indonesia dari 2018-2019 memperlihatkan China sebagai mitra dagang utama bagi Indonesia. China terus menjadi mitra dagang terbesar Indonesia bagi Indonesia. Menurut BPS, perdagangan sabuk bambu Indonesia pada 2018 Angka ini meningkat 23,7% dibandingkan tahun lalu dan menyumbang sekitar 20%

perdagangan Indonesia dengan semua mitra. Terdapat defisit perdagangan sebesar US\$18,1 miliar antara Indonesia dan China pada tahun lalu. Ekspor Indonesia ke China mencapai nilai sebesar US\$27,13 miliar, sementara impor Indonesia dari China mencapai nilai sebesar US\$45,54 miliar. Jepang merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia, dengan nilai perdagangan mencapai US\$37,46 miliar. Secara keseluruhan, nilai perdagangan Indonesia dengan 10 mitra utamanya meningkat 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai US\$263,3 miliar. Nilai ini juga menyumbang sebanyak 71,38% dari total nilai perdagangan (Kusnandar, 2019).

China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai US\$72,8 miliar pada tahun 2019. Meskipun begitu, neraca perdagangan antara kedua negara tersebut mengalami defisit sebesar USD 17 miliar. Impor Indonesia dari China mencapai US\$49,9 miliar, sedangkan eksportnya hanya sebesar US\$27,9 miliar. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) menjadi mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar US\$27 miliar setelah AS menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang. Tidak seperti dalam perdagangan dengan China, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar US\$8,5 miliar. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bernilai US\$17,7 miliar dan impornya sebesar US\$9,3 miliar (Jayani, 2020).

4.2.1 Hubungan Bilateral Indonesia dengan China

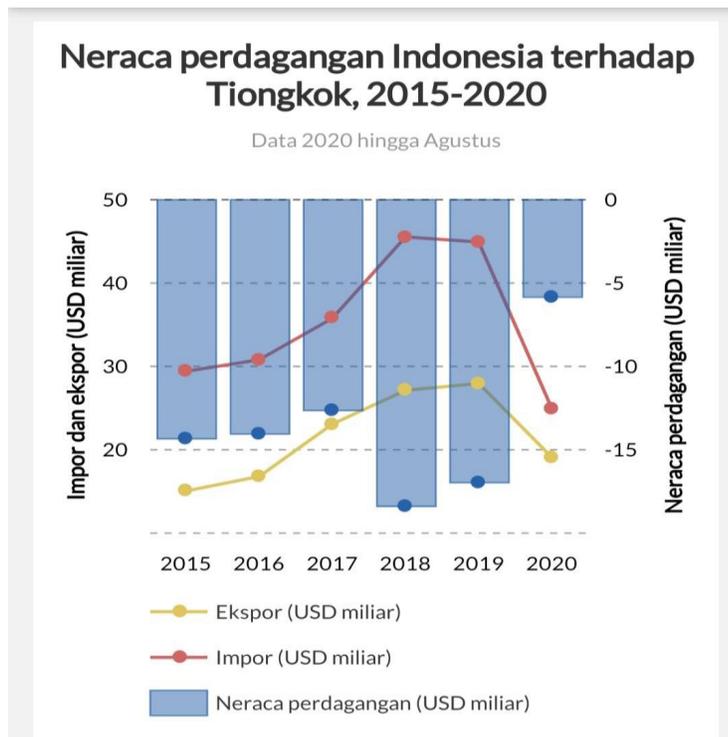
Pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat keenam di antara negara-negara yang sedang berkembang dan peringkat kelima di antara anggota G20. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di tingkat global. Secara geografis, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Kedua faktor ini berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Keunggulan yang jelas bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain adalah jumlah penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen pada tahun 2004, meningkat dari angka 13,1 persen pada tahun 1998.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 6,4 persen, yang menempatkannya sebagai salah satu ekonomi tercepat di Asia setelah China. Kondisi ini sering dianggap oleh banyak pengamat ekonomi sebagai indikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar yang sedang berkembang (*emerging market*). Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai lebih dari enam persen. Sebutan "*emerging market*" yang diberikan kepada Indonesia tentunya karena Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Negara ini dianggap sangat menarik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Selain mengintensifkan kerja sama dengan luar negeri, perkembangan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor domestik. Beberapa faktor domestik yang berperan dalam hal ini termasuk ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, pengelolaan ekonomi yang efisien, pertumbuhan kelas menengah ke atas, tingginya tingkat konsumsi domestik yang dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi penduduk Indonesia, serta jumlah penduduk yang mencapai sekitar 240 juta orang. Oleh karena itu, Indonesia berada di peringkat kedua setelah China dalam hal pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia. Perkembangan ekonomi China yang lebih fleksibel juga memungkinkan negara tersebut memiliki perekonomian yang lebih terbuka. Keterbukaan ini merupakan salah satu strategi China dalam mengembangkan ekonominya, dengan mengutamakan kepentingan asing, terutama dalam hal bisnis dengan negara-negara lain. Pendekatan ini dianggap sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi China. (Siwi, 2013)

Dalam sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan China, hubungan dagang telah terjalin sejak lama. Terdapat perkembangan yang signifikan dalam kerja sama ekonomi di antara keduanya, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Kerja sama ekonomi antara kedua negara tersebut mengalami stabilitas dan pertumbuhan yang semakin kuat pada tahun 90-an. Selain itu, implementasi ASEAN-China *Free Trade Agreement* (AKFTA) menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan China. Pada tahun 2002, AKFTA diratifikasi oleh ASEAN dan diikuti oleh Indonesia pada tahun 2003. Sejak saat itu, hubungan dagang antara kedua negara terus mengalami perkembangan. Data dalam tabel di bawah ini menunjukkan volume total perdagangan yang melibatkan ekspor dan impor produk migas dan nonmigas antara Indonesia dan China dalam kerangka kerja sama AKFTA (Siwi,

2013). Hubungan bilateral yang dijalin antara Indonesia dengan China menjadi semakin erat pada saat era pemerintahan Presiden Jokowi Widodo. Perayaan 65 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan China mencerminkan kedekatan politik luar negeri Indonesia terhadap China. Hubungan bilateral ini menekankan peningkatan kerja sama di berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, dan hubungan masyarakat (Duta, 2015). Pendekatan Indonesia dengan China dipengaruhi oleh kegagalan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan strategi Asianya. Pertumbuhan ekonomi China yang kuat menimbulkan ancaman terhadap peran Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi global. Amerika Serikat merespons dengan memperkenalkan konsep Rebalancing To Asia yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indo-Asia-Pasifik. Untuk mewujudkan rebalancing Asia tersebut, Amerika Serikat membentuk Trans-Pacific Partnership (TPP), sebuah kerangka kerja kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. TPP dirancang sebagai platform perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk memperdalam integrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara tersebut (Andika & Aisyah, 2017). Kerjasama Indonesia membuahkan hasil bagi Indonesia yang mana China menjadi mitra perdagangan Indonesia.



Sumber: lokadatas.beritagar.id

Aktivitas perdagangan antara Indonesia dan China selama periode 2015-2020 menunjukkan fluktuasi yaitu meningkatnya faktor permintaan dan penawaran. Nilai total ekspor impor antara kedua negara mencapai US\$78,5 miliar, dengan ekspor Indonesia ke China sebesar US\$37,4 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 10,10 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, nilai impor mencapai US\$41 miliar dan mengalami penurunan sebesar 10,13 persen. Penurunan impor tersebut mengakibatkan penyempitan defisit Indonesia dalam perdagangan dengan China (Tempo.com, 2021). Pada akhir tahun 2019 dunia mengalami wabah Covid 19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas lintas perdagangan internasional salah satu penyebabnya adalah melemahnya China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China dari 6,1 persen pada tahun 2019 menjadi 5,4 persen pada tahun 2020. Dari sisi perdagangan, China merupakan eksportir terbesar dunia. Pada 2018, ekspor China bernilai \$2,5 triliun. Pada saat yang sama, negara ini adalah pembeli terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam hal impor. Dampak dari penurunan aktivitas ekonomi China akhirnya terasa bagi negara-

negara pemasok seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia (Lidwina, Jayani, & Pusparisa, 2020) Di Indonesia, COVID-19 menyebabkan defisit perdagangan sebesar USD 3,7 juta pada April 2020. Meski defisit, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus USD 2,25 miliar pada Januari-April 2020. Menurut Onny Widjanarko, Kepala Bank Indonesia departemen komunikasi, angka tersebut dipengaruhi oleh perlambatan permintaan global dan gangguan pada rantai pasokan global. Pengaruh terhadap defisit neraca perdagangan pada bulan April 2020 juga disebabkan oleh defisit neraca perdagangan di luar sektor migas (Hendartyo, 2020)

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan China semakin erat mengingat status mereka sebagai anggota APEC dan ekonomi terbesar di G20. Kedua negara memiliki populasi yang besar, dengan China menjadi negara terpadat di dunia dan Indonesia menempati peringkat keempat. Di KTT G20 di Osaka, Jepang pada 28 Juni 2019, hubungan dagang antara Indonesia dan China terlihat semakin akrab. Sumber daya alam dan mineral yang melimpah di Indonesia memberikan keunggulan negosiasi yang tinggi dengan negara-negara maju seperti China, terutama dalam kemitraan yang saling menguntungkan seperti ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Pada tahun 2018, impor CPO China dari Indonesia melebihi satu juta ton, melebihi target yang telah ditetapkan oleh Presiden Xi sebelumnya. Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China diperkirakan akan semakin kuat, terutama dalam menghadapi dampak krisis perang dagang. Indonesia secara strategis menjadi mitra dagang yang penting dalam menjalin kemitraan dagang dengan berbagai mitra dagang (Sembiring.S.E.,M.Si, 2019)

4.2.2 Hubungan Bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat

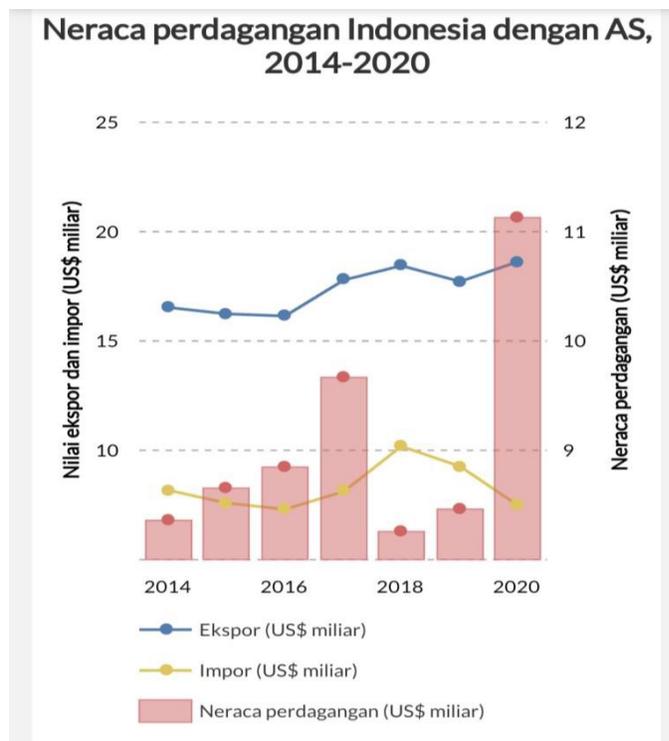
Hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia semakin kuat dalam konteks kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra dalam wilayah tersebut. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar, ekonomi terbesar ketujuh berdasarkan daya beli, dan memainkan peran kepemimpinan di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Batas wilayah Indonesia dengan Laut Cina Selatan menjadikannya lokasi sentral bagi

beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari \$5 triliun barang dan hingga 50% kapal tanker minyak dunia melintasi wilayah tersebut setiap tahun.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 1949, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya dari Belanda. Sejak reformasi dan proses demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998, stabilitas dan keamanan negara ini telah meningkat, serta mendorong perkuatan hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pada tahun 2010, kedua negara meluncurkan Kemitraan Global untuk mempromosikan keterlibatan yang konsisten dalam isu-isu seperti demokrasi, masyarakat sipil, pendidikan, keamanan, ketahanan dan mitigasi, transportasi, energi, dan perdagangan. Dalam proses membangun kesuksesan mereka, pada tahun 2015 kedua negara memperkuat hubungan mereka menjadi kemitraan strategis AS-Indonesia, memperluas kerja sama dalam isu-isu penting regional dan global. (U.S Department of State, 2022). Kekuatan politik, militer, dan ekonomi Amerika Serikat terus bertahan sebagai yang terbesar di dunia. Bagi Indonesia, Amerika Serikat memiliki peran penting sebagai salah satu mitra dagang utama setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang. Nilai total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai \$1,56 miliar, terdiri dari ekspor migas senilai \$56 juta dan ekspor nonmigas senilai \$1,5 miliar. Di sisi lain, terjadi penurunan total ekspor Amerika Serikat ke Indonesia sebesar 7,84%, dengan penurunan yang signifikan terjadi pada ekspor migas (lebih dari 50%).

Diketahui bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat melibatkan sektor-sektor seperti karet, tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan mesin listrik. Di sisi lain, Amerika Serikat mengimpor produk pertanian, pesawat terbang, mesin, serta benang dan kain katun dari Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2012). Menurut data yang dikeluarkan oleh United States International Trade Commission (USITC), pada tahun 2018, total perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia mencapai US\$ 29 miliar. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai US\$ 20,8 miliar, sementara impor dari Amerika Serikat mencapai US\$ 8,2 miliar (Garenta, 2019). Pada tahun 2019, Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai mitra keempat terbesar dengan total perdagangan sebesar US\$ 27 miliar, dan mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Nilai ekspor Amerika Serikat mencapai US\$ 17,7 miliar, sementara impor mencapai US\$ 9,3 miliar. Kinerja perdagangan Amerika Serikat mencatat surplus sebesar US\$ 8,5 miliar, yang berbeda dengan defisit yang dialami oleh China (Jayani, 2020). Pertumbuhan

ekonomi Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah berlangsung stabil selama dekade terakhir, dengan rata-rata sekitar 5-6 persen. Meskipun terdapat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, inflasi tetap moderat, investasi asing langsung meningkat, dan suku bunga relatif rendah. Namun, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sekitar 2 persen pada tahun 2020. Selain itu, impor Indonesia dari Amerika Serikat mencapai US\$ 12,66 miliar, mengalami peningkatan sebesar 17,40 persen. Akibatnya, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (Lokadata, 2020).



Sumber: lokadata.beritagar.id

Diperkirakan bahwa nilai perdagangan barang antara Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2021 akan mencapai jumlah yang melebihi \$37 miliar, sementara perdagangan jasa diperkirakan mencapai sekitar \$2 miliar pada tahun 2020. Beberapa komoditas ekspor utama Amerika Serikat ke Indonesia mencakup kedelai, pesawat terbang, bahan bakar mineral, mesin, dan kapas. Pada tahun 2020, investasi langsung dari Amerika Serikat ke Indonesia mencapai angka \$18,7 miliar. Amerika Serikat akan terus menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk

meningkatkan reformasi ekonomi, termasuk memperkuat iklim investasi dan mengurangi hambatan perdagangan seperti undang-undang proteksionis, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan dalam undang-undang pembangunan yang tidak merata (U.S Departemnt of State, 2022). Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam perang dagang antara China dan Amerika Serikat, tetapi sebagai dua negara mitra dagang yang terlibat dalam perang dagang, dampak negatifnya dirasakan oleh Indonesia. Dalam konteks perang dagang, terjadi efek putaran kedua atau interdependensi yang mengakibatkan China dan Amerika Serikat harus mengurangi impor produk bahan baku dari Indonesia. Untuk menghadapi dampak dari efek putaran kedua ini, Indonesia harus mencari pasar alternatif di negara lain untuk menjual bahan baku dan produknya. Namun, tantangan dalam melakukannya dapat dikatakan cukup besar (Anggit, 2018). Selain itu, terdapat dampak positif secara tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia yang menyebabkan sejumlah investor memindahkan investasinya ke negara lain. Jika Indonesia berhasil menarik investor untuk memilih berinvestasi di dalam negeri, hal ini dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan (CAD) dan seimbang dengan transaksi modal dan finansial. Namun, upaya untuk menarik investor agar merekomendasikan investasinya ke Indonesia mungkin tidaklah mudah karena harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India (Anggit, 2018).

Selama berlangsungnya perang dagang antara China dan Amerika Serikat, Indonesia menjaga posisi netral terhadap Amerika Serikat setelah pertemuan yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada Agustus 2018. Dalam pertemuan tersebut, dikonfirmasi bahwa perang dagang hanya terjadi antara China dan Amerika Serikat, bukan melibatkan Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia juga memperingati 70 tahun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dengan tema '*Celebrate Our Diversity and Prosper Together as Strategic Partner*', yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan antara kedua negara (Tempo.com, 2018)

4.3 Kebijakan Perdagangan Internasional Donald Trump

Diberlakukan kegiatan ekspor impor oleh suatu negara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Sebelum kebijakan Donald Trump diberlakukan, yaitu penerapan bea impor sebesar 30 persen untuk panel surya dan 20 persen untuk mesin cuci pada bulan Januari 2018, yang kemudian memicu

terjadinya perang dagang. Sebelum adanya kebijakan perdagangan internasional yang dibuat oleh Donald Trump dalam buku hukum ekspor impor karya Adrian Sutedi (Sutedi, 2014) perdagangan internasional sudah memiliki tujuan dari kebijakan perdagangan internasional:

1. Melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri.
2. Menjaga kondisi ekonomi nasional agar tidak terpengaruh secara negatif.
3. Memperhatikan perlindungan terhadap lapangan kerja.
4. Menjaga stabilitas nilai tukar.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. Menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional.

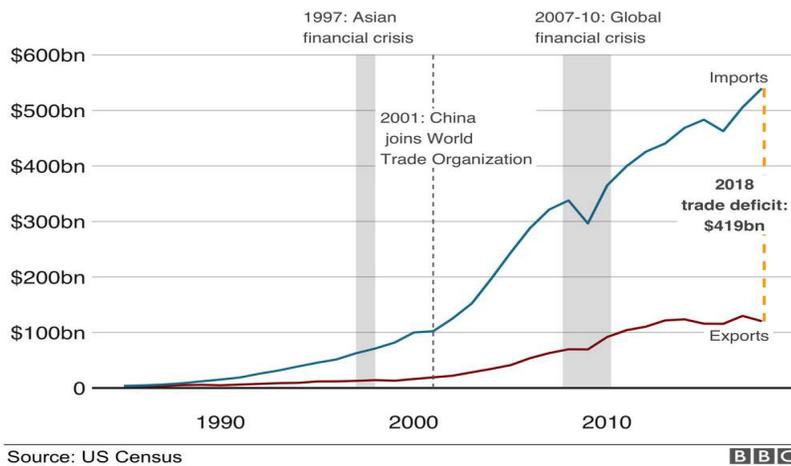
Serta terdapat kebijakan perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi secara langsung berbagai aspek dalam struktur komposisi dan transaksi, terutama dalam bidang ekspor. Kebijakan tersebut mencakup beberapa hal, seperti pemberian subsidi ekspor untuk meningkatkan dan memajukan ekspor melalui pembebasan pajak dan fasilitas serta pengurangan biaya. Selain itu, pemerintah juga menetapkan prosedur ekspor yang dapat dipermudah. Kebijakan lainnya adalah dumping, di mana harga barang ekspor ditetapkan lebih murah daripada di dalam negeri, serta larangan ekspor untuk beberapa barang tertentu berdasarkan alasan ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Ada pula diskriminasi harga, di mana harga barang ekspor ditetapkan berbeda untuk setiap negara sesuai dengan perjanjian yang terkait. Terakhir, politik dagang bebas memungkinkan pemerintah untuk memberikan kebijakan agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor secara bebas. Setelah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2018, Donald Trump melaksanakan kebijakan politik perdagangan dengan tujuan mewujudkan slogan kampanyenya, "make America great again". Implementasi kebijakan ini kemudian menimbulkan masalah dalam perdagangan internasional dan ekonomi global pada pertengahan tahun 2018. Dampak dari kebijakan tersebut memicu terjadinya konflik perdagangan antara tiga kekuatan ekonomi utama, yaitu Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa (Gandara, 2021).

Dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan China, terjadi pengeluaran kebijakan perdagangan oleh Amerika Serikat sebagai respons terhadap China. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah tarif perlindungan global (global safeguard tariffs) dengan

penerapan tarif impor sebesar 30% pada panel surya pada bulan Februari 2018. Selain itu, pada bulan April 2018, Amerika Serikat juga menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium terhadap produk-produk China. Pada bulan Juli, United States Trade Representative (USTR) mengumumkan daftar awal sebanyak 1.334 produk yang akan dikenai tarif sebesar 25%. Tindakan-tindakan tersebut diambil karena Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan China sebesar \$43,6 miliar pada tahun 2018, yang kemudian meningkat menjadi \$419,2 miliar (BBC News, 2019).

US trade with China

US trade deficit with China has soared since 1985

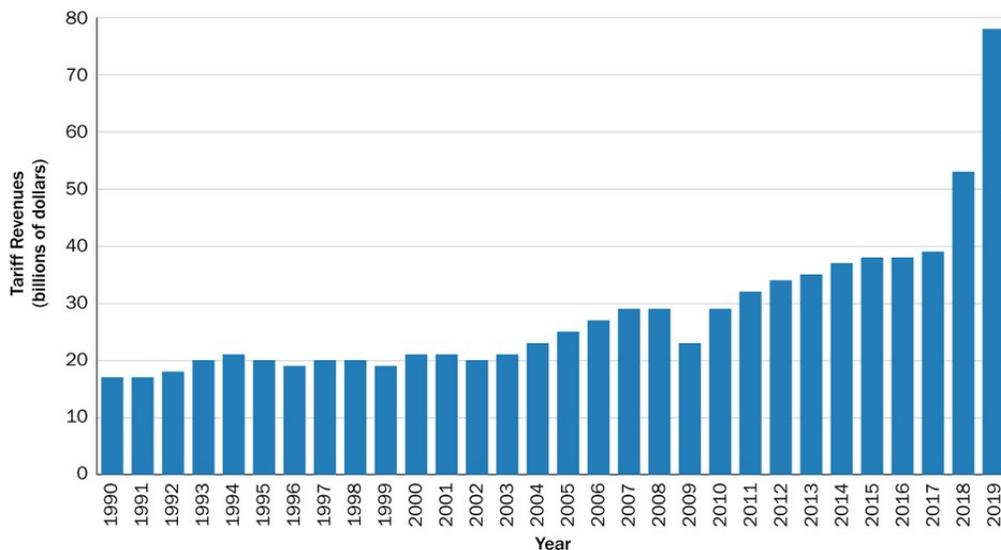


Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-43512098>

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dipicu oleh berbagai kebijakan yang terus diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap China hingga bulan Agustus 2018 (Pablo, 2018). Respon terhadap kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap produk impor dari China melibatkan langkah China untuk menetapkan tarif masuk terhadap 128 produk Amerika Serikat, termasuk komoditas ekspor utama Amerika Serikat ke China. Keinginan Donald Trump membuat suatu kebijakan perdagangan untuk memfokuskan kenaikan jumlah ekspor dibandingkan dengan impor, yang dimana nilai ekspor lebih memberikan keuntungan yang besar terhadap pendapatan negara (Welfens, 2020). Presiden Trump memiliki keinginan untuk mengurangi defisit perdagangan dengan China, yang menurutnya merupakan akibat dari praktik perdagangan yang tidak adil yang dilakukan China sebelum dia menjadi Presiden. Situasi ini

juga menyebabkan kerugian dalam sektor manufaktur Amerika Serikat (BBC News, 2019). Kebijakan Amerika Serikat tersebut bertujuan untuk membatasi lapangan produksi China yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekspor China serta memproteksi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melakukan proteksionisme perdagangan yang besar serta melakukan serangkaian tarif terhadap China, Kanada, Uni Eropa. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan tarif sebagai peran utama dalam melindungi industri dengan menggunakan kekuatan untuk menaikkan tarif panel surya, mesin cuci, baja serta aluminium dan berbagai produk China, sehingga pada 2019 Amerika Serikat mengalami keuntungan dengan membawa masuk tarif sebesar \$79 miliar di banding pada tahun sebelumnya (Gertz, 2020)

Tariff Revenues (billions of US dollars)



Sumber: <https://www.brookings.edu/policy2020/votervital/did-trumps-tariffs-benefit-american-workers-and-national-security/>

Pendapatan tarif sebesar \$79 miliar yang dibawa Departemen keuangan berasal dari tiga sumber yaitu perusahaan asing yang mengekspor barang ke Amerika Serikat; perusahaan Amerika yang mengimpor barang dari luar negeri, atau menggunakan input impor dalam proses produksinya; dan rumah tangga Amerika sebagai konsumen akhir (Gertz, 2020). Amerika Serikat menggunakan kebijakan tarif bertujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan global

dan mengejar kebijakan luar negeri yang luas, Amerika Serikat sebenarnya telah mengurangi dan menghapus sebagian tarif dari hubungan bilateral dan multilateral perjanjian perdagangan dengan mendukung pembuatan GATT dan WTO dalam berbasis aturan (Federation Of American Scientist, 2023).

Menurut Yukon Huang yang merupakan rekan senior di Program Carnegie Asia menyebutkan bahwa kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan kesalahan awal dari pemerintahan Trump dalam melancarkan perang dagang dengan berasumsi defisit perdagangan AS-China yang terjadi saat suatu negara mengimpor lebih banyak dibanding ekspor yang buruk sehingga China harus disalahkan yang menyebabkan neraca perdagangan Amerika Serikat didorong oleh melonjaknya defisit anggaran federal Amerika Serikat, yang tidak ada kaitan dengan China. Selama berlangsungnya tiga tahun tarif Trump di mulai untuk memperbaiki defisit perdagangan Amerika Serikat bilateral antara Amerika Serikat dan China level pulih yang dimana China mengalami surplus yang meningkat dan Amerika Serikat mengalami defisit semakin parah (Huang, 2021). Ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan perdagangan yang meningkatkan tarif impor baja dan aluminium, hal tersebut memicu kecaman dari beberapa negara dan menyebabkan kerugian. Meskipun ada beberapa negara yang mungkin mendapatkan keuntungan dari perang dagang tersebut, reaksi keras tetap muncul terhadap negara-negara yang memiliki ketergantungan atau kerja sama dengan Amerika Serikat (Aprilianti, 2019).

Dampak dari kebijakan tersebut memberikan efek yang beragam bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Fenomena ini memberikan dampak baik dan buruk bagi beberapa negara yang melihat konflik ini sebagai peluang untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Indonesia juga termasuk di antara negara-negara yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari perang dagang tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter (Sri, 2019). Untuk menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyusun strategi moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Bank sentral Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya tarik modal asing agar tetap

berinvestasi di pasar saham Indonesia, meskipun sedang terjadi konflik perekonomian global (Bariah, Anam, & dkk, 2020).

4.4 Respon Kebijakan Perdagangan Internasional Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Adanya Perang Dagang China dan Amerika Serikat

Terjadinya konflik perang dagang terhadap negara Amerika Serikat dan China bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Indonesia yang merupakan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi terhadap negara yang terlibat serta bagaimana dampak yang dialami oleh Indonesia. Tidak bisa diabaikan dampak yang dihasilkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China terhadap Indonesia, mengingat kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Keterlibatan ekonomi Amerika Serikat dan China memiliki peran yang signifikan dalam skala global, dengan Amerika Serikat mengimpor 13,5 persen dari total impor dunia dan China berkontribusi sebesar 10,3 persen. Ketegangan hubungan Amerika Serikat-China berdampak pada kerjasama multilateral. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mengandalkan kerja sama multilateral dalam mencapai tujuan terpengaruh dengan ada konflik. Dampak perang dagang antara kedua negara tersebut terasa bagi Indonesia sebagai negara pengirim ekspor dan tujuan investasi. Indonesia mengalami dampak negatif dari konflik tersebut, terutama dalam kinerja ekspor yang mengalami penurunan sebesar 0,24 persen.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Selama periode perang dagang berlangsung, terjadi penurunan impor Indonesia dari China dan Amerika Serikat pada tahun 2019. Meskipun demikian, situasi perang dagang ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan memanfaatkan pasar ekspor nasional di Amerika Serikat dan China. Tindakan penghambatan perdagangan produk China oleh Amerika Serikat memberikan peluang bagi Indonesia dan

mengekspor dan memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya dengan china yang menghambat produk dari Amerika Serikat membuat Indonesia mempunyai peluang untuk mengekspor produk CPO. Kedua negara akan berupaya menemukan pelanggan baru yang tertarik dengan produk ekspor Indonesia yang memiliki harga bersaing (Sembiring.S.E.,M.Si, 2019). Salah satu kedelai Amerika Serikat yang dikenakan tarif oleh China akan beralih pasar di luar China dan potensial kedelai akan masuk ke Indonesia serta mengalami peningkatan produksi kedelai sebesar 2,9 to pada tahun 2018. Sedang produk China yang akan berpotensi masuk kedalam pasar Indonesia seperti baja. Kebutuhan baja oleh Indonesia setiap tahunnya mencapai 8 juta ton. Sehingga dapat dipastikan kedua negara akan menyerbu pasar Indonesia. Tidak hanya keuntungan yang dialami Indonesia dampak selanjutnya berupa terganggunya neraca perdagangan Indonesia dengan neraca pembayaran masih tinggi dan mengganggu nilai tukar rupiah yang disebabkan terganggunya nilai tukar rupiah. Nilai rupiah yang akan melemah serta akan menyedot cadangan devisa, nilai utang meningkat, perusahaan dalam negara yang menggunakan komponen impor yang semakin tinggi (Arham, 2018)

Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh trump pemerintah indonesia memberikan respon terhadap pemerintah Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartono menilai kebijakan evaluasi yang diambil oleh Trump merupakan suatu alasan untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia. Berdasarkan perhitungan Kementerian Perdagangan, Indonesia mendapatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sekitar US\$ 9 Miliar. Tanggapan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terhadap selisih yang signifikan dalam perhitungan surplus antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat berbeda. Menurutnya, surplus Indonesia sebesar 9 miliar dolar AS, sedangkan Amerika Serikat mencatat surplus sebesar 13 miliar dolar AS. Dalam mengantisipasi ancaman Donald Trump Menteri Perdagangan Enggartiasto melakukan upaya phobia dengan mengirimkan surat kepada USTR dan Duta Besar Amerika Serikat (Exist, 2018). Serta Pemerintah Indonesia menyikapi fenomena perang dagangan Amerika Serikat - China dengan menerbitkan kebijakan pemerintah sebanyak dua kebijakan. Pertama, langkah yang diambil adalah mengatur keseimbangan perdagangan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Kedua, upaya dilakukan dengan mendorong masuknya investasi langsung, baik melalui penyederhanaan proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS) maupun melalui implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE) (www.ekon.go.id, 2018)

4.4.1 Perluasan Kerjasama Bebas Dagang Indonesia

Indonesia melihat perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebagai situasi yang tidak menguntungkan kedua belah pihak, tetapi sebaliknya menjadi peluang bagi Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia dianggap sebagai zona aman untuk investasi karena memiliki stabilitas geopolitik yang cukup baik. Sebagai hasilnya, banyak investor tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia (KOMINFO, 2019). Di tengah perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen untuk terus membangun hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan China dan Amerika Serikat memiliki peran yang strategis dalam kerja sama ekspor dan impor dengan Indonesia. Dengan adanya dinamika yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang dinilai lebih tinggi pada bidang ekspor impor. Seperti yang diharapkan, pertumbuhannya dinamis perekonomian Indonesia sebenarnya lebih tinggi dari nilai ekspor Indonesia dengan China dibandingkan dengan Amerika Serikat, namun nilai impor Indonesia melebihi China ekspor. Nilai ekspor Indonesia dan Amerika Serikat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada nilai impor dalam sektor perdagangan. Sebaliknya, ekspor-impor Indonesia nilai ekspor China lebih tinggi dari Amerika Serikat, tetapi nilai impor Indonesia jauh lebih tinggi dari ekspor neraca perdagangan dengan China (Ananda & Gaol, 2021).

Dengan pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dan kedatangan Joe Biden sebagai pemimpin baru, terdapat dukungan yang kuat terhadap hubungan perdagangan yang lebih kondusif dan peningkatan aksesibilitas perdagangan dan investasi. Di tengah situasi perang dagang yang sedang berlangsung, Indonesia juga telah menerapkan sejumlah kebijakan perdagangan. Salah satunya adalah pengoptimalan pemanfaatan Generalized System of Preferences (GSP) guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia sedang berupaya mencapai keseimbangan perdagangan dan investasi yang bersifat non-tradisional serta menciptakan peluang investasi yang saling menguntungkan antara Amerika Serikat, China, dan negara-negara lainnya, termasuk melalui fasilitas perdagangan dan integrasi regional.

Selama periode Januari-November 2020, terjadi peningkatan dalam nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 3,57 persen, sedangkan impor Indonesia dari Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 8,91 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil positif terlihat dalam kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China

melalui Skema ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selama periode yang sama, ekspor Indonesia ke China mengalami kenaikan sebesar 10,96 persen, sementara impor mengalami penurunan sebesar 13,81 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indonesia, di samping itu, menjalin kerja sama bilateral dengan Persatuan Ekonomi Eurasia (EAEU) sebagai langkah untuk memperluas pasar ekspor. Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan perundingan untuk Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Peluncuran tersebut melibatkan Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, dan Anggota Dewan Kementerian Perdagangan EAEU, Andrey Slepnev.

Perundingan mengenai IEAEU-FTA melibatkan 11 kelompok kerja yang menitikberatkan pada berbagai aspek, termasuk perdagangan barang, perdagangan digital, ketentuan hukum dan masalah kelembagaan, keamanan perdagangan, aturan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitas perdagangan, hambatan teknis perdagangan, kerja sama, keamanan perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. (KEMENDAG RI, 2023). Perundingan tersebut bertujuan untuk mengembangkan pasar yang tidak biasa bagi Indonesia di kawasan Eurasia, termasuk Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Melalui strategi ini, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan bilateral dan memperluas kerjasama perdagangan bebas dengan sejumlah negara lain ke level yang lebih tinggi, dengan memanfaatkan peluang pasar di negara-negara mitra dagang yang tidak biasa (*Free Trade Agreements*, 2022). Dalam perjanjian perdagangan tersebut, terdapat ketentuan mengenai perdagangan barang, aturan untuk memperlancar perdagangan, serta kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 berupaya untuk memperluas jaringan dagang dan meningkatkan kinerja perdagangan Internasional ke Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika. Indonesia mengupayakan diplomasi ekonomi melalui kebijakan luar negeri Indonesia dan perdagangan bilateral antar Negara dan Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA)

dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). PTA merupakan perjanjian kerja sama perdagangan yang mengurangi tarif atau produk antar Negara anggota perjanjian PTA.

Beberapa perjanjian bilateral yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing Negara mitra di antaranya adalah:

1. Indonesia – Palestina: *MoU on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*. Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena terdapat pilihan sumber asal kurma dan minyak zaitun dengan tarif yang bermanfaat. Perjanjian ini sudah diratifikasi dalam Perpres Nomor 34 Tahun 2018, dan telah berlaku mulai 21 Februari 2019.
2. Indonesia – Chili: *Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)*. Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia mendapatkan potongan 89.6 persen dari pos tarif Chile. Bukan itu saja, Chile juga menjadi penghubung (hub) yang menghubungkan kawasan Amerika Selatan dengan produk ekspor Indonesia. Perjanjian ini sudah diratifikasi dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2019, dan telah berlaku mulai 10 Agustus 2019.
3. Indonesia – Eropa (*Indonesia - European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*). Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena akses pasar Indonesia dapat diperluas dan Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk kehutanan, jasa, industri, pertanian, tenaga kerja Indonesia, dan perikanan. Indonesia juga dapat meningkatkan investasi dua arah Australia-Indonesia, dengan ini Indonesia jadi bisa meningkatkan potensi kerja sama. Perjanjian ini sudah diratifikasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2020 dan telah berlaku mulai 5 Juli 2020.
4. Indonesia – Eropa (*Indonesia – European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*). Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia dapat membuka akses pasar ke Negara-negara EFTA dan menghapus tarif bea masuk. Produk Indonesia seperti kelapa sawit, ikan, emas, kopi, dan produk industri manufaktur mendapat tarif nol persen di pasar EFTA. Perjanjian ini sudah diratifikasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2021 dan telah berlaku mulai 1 November 2021.

5. Indonesia – Mozambique (*Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA)*) Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia mendapatkan penurunan tarif pada produk-produk tertentu, seperti ikan, buah, minyak, kertas, kain, dan lainnya. IM-PTA juga diharapkan dapat mendorong minat pengusaha untuk meningkatkan potensi pasar non tradisional, khususnya di Negara Afrika. Mozambik juga diharapkan dapat menjadi perhubungan antara kawasan Afrika Sub-Sahara dan Indonesia. Perjanjian ini sudah diratifikasi dalam Perpres Nomor 90 Tahun 2021 dan telah berlaku mulai 6 Juni 2022.
6. Indonesia – Korea (*Indonesia – Republic of Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*). Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia berpotensi untuk mendapatkan peningkatan ekspor sebesar 19.8% ke Republik Korea. Indonesia juga berpotensi untuk mendapatkan peningkatan penanaman modal ke Amerika Serikat sebesar 3,63 miliar Dolar saat implementasi IK-CEPA tahun kelima. Perjanjian ini sudah diratifikasi dalam UU Nomor 25 tahun 2022 dan telah berlaku mulai 1 Januari 2023.
7. Indonesia – Uni Emirat Arab (*Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)*). Perjanjian ini bermanfaat bagi Indonesia karena Indonesia berpotensi untuk meningkatkan akses produk ekspor Indonesia ke PEA, kawasan Timur Tengah dan ke kawasan Afrika. Perjanjian ini sudah ditandatangani tanggal 1 Juli 2022 dan ratifikasinya sedang diproses (Setkeb.go.id).

Penting untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian perdagangan bilateral yang telah ada di Indonesia, termasuk penggunaan CEPA dan PTA, guna memaksimalkan manfaatnya dalam mendukung kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di pasar-pasar non tradisional yang lebih luas (Setkab.go.id, 2023).

4.4.2. Kebijakan Kelonggaran Tarif Bagi Negara Lain

Kebijakan perdagangan internasional merupakan kebijakan yang dilakukan suatu negara dalam tindakan atau aturan yang mempengaruhi struktur dan komposisi dan arah perdagangan Internasional dalam mengatasi kesulitan hubungan perdagangan guna melindungi kepentingan nasional (Rochmat, 2020). Kebijakan perdagangan internasional dibuat dengan berbagai tujuan, termasuk melindungi kepentingan nasional, industri domestik, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas dan keseimbangan pembayaran internasional. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan cadangan devisa. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi perekonomian domestik mereka dalam konteks perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas kemudahan tarif bagi negara-negara lain yang terkait ekspor-impor. Pemerintah berusaha memfasilitasi kelancaran perdagangan internasional melalui berbagai kebijakan yang memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang secara langsung merupakan kebijakan fiskal seperti bea yang memberlakukan tarif terhadap barang ekspor dan impor dengan memberikan insentif perpajakan dalam bentuk kebebasan kepabean dan cukai serta perpajakan atas impor (KEMENKEU, 2022).

Kebijakan perdagangan dapat membantu meningkatkan daya saing pasar bagi barang produksi dalam negeri melalui sistem perdagangan bebas atau sistem perdagangan yang dilindungi. Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan internasional di antaranya adalah dengan memberlakukan kebijakan pembebasan tarif bea masuk impor antara negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA didirikan dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi negara-negara Asia Tenggara dengan meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Dalam kerangka AFTA, tarif perdagangan antara negara anggota dapat dikurangi atau dihapuskan, sehingga mengurangi hambatan tarif yang ada dalam perjanjian perdagangan. Selain itu, AFTA juga mencakup program-program ekonomi yang diatur dalam CEPT (Common Effective Preferential Tariff), seperti penghapusan tarif untuk barang non-pertanian dan peningkatan produktivitas sektor pertanian di negara-negara anggota AFTA. Selain itu, AFTA juga bertujuan untuk mengurangi hambatan kuantitatif dan non-tarif, serta mendorong kerjasama dalam pengembangan fasilitas perdagangan di wilayah

tersebut. Selain itu, AFTA juga mengatur penetapan persentase kandungan lokal atau domestic obligation sebesar 40% bagi barang produksi. Pembebasan bea masuk atas impor barang tertentu juga merupakan kebijakan internasional yang berpengaruh besar terhadap rantai produksi.

Pengurangan dan penghapusan bea masuk telah diatur oleh Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49/PMK.010/2022, yang berlaku dalam kerangka persetujuan perdagangan bebas antara ASEAN dan Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan pembebasan bea masuk ini bertujuan untuk mempermudah perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dengan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang impor. Langkah ini membantu mempermudah proses perdagangan dan mendorong kerja sama di dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Penerapan tarif impor dan ekspor juga memiliki tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri kecil, agar tetap memiliki daya saing dalam perdagangan internasional. Dengan menerapkan tarif yang sesuai, produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor dan memperoleh keuntungan yang adil dalam pasar global.

4.4.3 Pemerintah Indonesia memberikan lisensi ekspor impor terhadap negara lain

Pemerintah Indonesia memberikan lisensi ekspor impor terhadap negara lain karena bentuk proteksionisme untuk melindungi para kaum pedagang dari kerugian yang ditimbulkan oleh pasar bebas dan menyetujui bentuk intervensi negara ke dalam pasar. Friedrich List seorang tokoh merkantilisme memaknai keinginan pasar bebas dari suatu negara hanya untuk kepentingan para pedagang di negara tersebut. Negara-negara harus membangun kerjasama ekonomi untuk membuka pasar bebas demi keuntungan perdagangan yang akan diperolehnya, karena dasar perjanjian pasar bebas seperti FTA dikendalikan dan disepakati oleh negara maka mustahil pasar bebas hadir tanpa intervensi negara, sehingga walaupun teori merkantilisme sudah tidak lagi relevan di masa modern namun kebijakan proteksionisme secara tersirat tetap dilakukan oleh negara-negara guna melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri

Kemudian proteksionisme sendiri merupakan kebijakan ketat perekonomian dibidang perdagangan internasional dengan langkah suatu negara untuk membatasi perdagangan antar negara yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan perekonomian negara yang melakukannya. Negara yang melakukan proteksionisme secara tersirat akan berusaha untuk

menutup pasar dagang antar negara dengan kebijakan pajak, tata cara niaga, serta bea cukai dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya sehingga proses perdagangan menjadi terhalang. Kebijakan ini juga bermaksud untuk mengurangi masuknya barang-barang impor ke negara tersebut oleh peraturan pemerintahan yang menerapkan kebijakan ini. Kebijakan-kebijakan perdagangan tersebut adalah mengenai tarif, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor sukarela, persyaratan kandungan lokal, subsidi kredit ekspor, pengendalian pemerintah (national procurement), Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers).

Salah satu kebijakan adanya perubahan tarif impor terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan tarif impor yang naik menyebabkan peningkatan input produksi untuk ikan olahan dan ikan kering masing-masing sebesar 32% dan 34,5%. Dampak kebijakan peningkatan tarif impor terhadap input produk olahan selaras dengan tujuan kebijakan pengenaan tarif impor untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diharapkan pemerintah masih mengenakan tarif impor terutama untuk barang komoditas yang memiliki daya saing (Mira & Saptanto, 2017).

Kebijakan pemerintah di bidang impor terbagi menjadi dua kategori, yaitu hambatan tarif dan non-tarif. Berikut masing-masing penjelasannya (OCBC NISP,2023)

1. Kebijakan Hambatan Tarif

Untuk menghindari membludaknya barang-barang impor dari luar negeri, pemerintah menetapkan kebijakan hambatan tarif dengan mengenakan pungutan Bea Masuk.

Jadi, barang impor yang masuk ke Indonesia akan dikenakan biaya dengan perhitungan tertentu.

2. Kebijakan Hambatan Non-Tarif

Kebijakan hambatan non-tarif mengacu pada aturan yang berupa aspek non-pajak.

Dalam hal ini, pembatasan bisa berupa volume barang, standar produk, hingga pemberian lisensi.

Kebijakan jenis ini dapat memengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran operasional perusahaan.

Meskipun begitu, perusahaan juga bisa mendapat keuntungan dari naiknya harga barang di pasaran. Sederhananya, karena kuota impor menjadi lebih rendah, *demand* pun meningkat.

Kebijakan Perdagangan Internasional di Bidang Impor

Setelah mengetahui dua jenis kategorinya, contoh-contoh yang merupakan kebijakan di bidang impor adalah sebagai berikut.

1. Kuota Impor

Kuota impor adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi jumlah produk dari luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan ini merupakan proteksi terhadap barang-barang dalam negeri yang sering kali kalah saing dalam sisi harga dengan produk impor. Mekanisme diterapkannya kuota impor terbagi menjadi dua, yaitu Pengekangan Ekspor Sukarela (VER) dan kuota tersembunyi.

Pembatasan Ekspor Sukarela atau VER berarti kuota ditentukan secara sukarela oleh negara yang mau melakukan ekspor kepada negara mitra. Sementara itu, kuota tersembunyi berarti negara membatasi kiriman barang tanpa secara gamblang menerapkan kuota impor dari negara lain.

Contohnya, pemerintah membatasi secara ketat kontrol kualitas untuk semua barang impor, sehingga yang mutunya di bawah standar akan ditolak.

2. Pengendalian Devisa

Devisa merupakan aset keuangan yang harus dimiliki untuk bertransaksi dalam perdagangan internasional. Pengendalian devisa berarti merujuk pada pembatasan persediaan devisa untuk negara pengimpor, sehingga importir perlu membatasi kuantitas barang yang akan dikirim.

3. Bea masuk

Bea masuk adalah kebijakan di bidang impor dengan mematok tarif pajak tertentu untuk barang-barang dari luar negeri. Bea masuk berlaku untuk barang dengan nilai impor lebih dari USD3 (setara Rp45.000) per kiriman. Di bawah itu, pajak yang dikenakan hanyalah PPN sebesar 11%. Untuk barang dengan nilai impor lebih dari USD3 hingga USD1500 per kiriman, bea masuk yang harus dibayarkan adalah sebesar 7,5% dan PPN 11%. Sementara itu, barang yang memiliki nilai impor lebih dari USD1500 untuk setiap kirimannya akan dikenakan bea masuk, PPN, dan PDRI. Sebagai catatan, bea masuk tidak berlaku untuk buku impor yang bertema ilmu pengetahuan, teknologi, pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama.

4. Subsidi

Berbeda dengan beberapa kebijakan sebelumnya, aturan jenis ini diterapkan kepada produsen barang dalam negeri. Kadang kala, konsumen lebih memilih untuk mengonsumsi produk luar negeri karena harganya yang lebih murah dibanding barang produksi dalam negeri. Mengatasi hal tersebut, pemerintah biasanya akan menerapkan subsidi kepada produsen, contohnya yaitu dengan mengurangi biaya yang digunakan untuk proses produksi. Alhasil, produk dalam negeri pun dapat dipatok dengan harga yang lebih murah.

5. Devaluasi

Mungkin Anda akan merasa senang apabila nilai mata uang rupiah mengalami kenaikan terhadap dolar. Namun ternyata, pemerintah terkadang dengan sengaja menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Hal inilah yang disebut dengan devaluasi.

Intinya, devaluasi adalah kebijakan di bidang impor yang bertujuan untuk menurunkan nilai mata uang nasional terhadap mata uang asing dengan sengaja. Dengan menerapkan devaluasi, harga barang impor pun menjadi semakin mahal, dan konsumen akhirnya memilih untuk mengonsumsi produk dalam negeri.

6. Larangan Impor

Larangan jenis ini adalah contoh kebijakan di bidang impor dengan melarang kiriman barang dari luar negeri untuk maksud dan tujuan tertentu. Barang yang dilarang impor umumnya memiliki kriteria berikut:

- 1) Barang berbahaya atau fatal
- 2) Barang rusak atau cacat

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 berikut beberapa jenis barang yang dilarang diimpor ke Indonesia:

- Gula dengan jenis tertentu.
- Beras dengan jenis tertentu.
- Bahan perusak lapisan ozon.
- Kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

- Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon 22* (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi.
- Bahan obat dan makanan tertentu.
- Bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah non bahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar.
- Perkakas tangan (bentuk jadi).
- Alat kesehatan yang mengandung merkuri.

Untuk keperluan domestik, impor teknologi tinggi, dan impor barang modal berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, negara berkembang yang mampu tumbuh berkembang disebabkan dan diuntungkan adanya kehadiran teknologi tinggi dan impor barang modal yang berasal dari pengembangan kebijakan industri yang mampu mendongkrak domestik produksi input untuk sektor pengekspor, yang mempunyai hubungan sangat relevan antara impor dengan adanya kenaikan ekspor yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pangsa barang impor berteknologi tinggi dan impor barang modal berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi negara (Carrasco & Tovar-García, 2020). Hal ini merupakan upaya diversifikasi ekonomi yang agresif dengan menerapkan kebijakan dan insentif yang akan mendorong ekspor non-minyak, sektor manufaktur dan secara keseluruhan mendorong pertumbuhan industri.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran, Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang atas PEB yang

disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi teknis, wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketentuan yang disampaikan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh DJBC. Terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang dilakukan pengawasannya oleh DJBC, dapat dilihat melalui Portal INSW sebagai referensi tunggal ketentuan lartas Impor atau Ekspor pada *website* www.insw.go.id.

4.4.4 Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Kelonggaran Kuota Ekspor Impor Terhadap Mitra Dagang lain

Hubungan ekonomi antar negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masing-masing negara. Daya saing merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam berkompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia. Neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana

perdagangan dan investasi dibandingkan kewajiban- kewajiban yang dibayarkan sedangkan dikatakan defisit apabila nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Keadaan neraca pembayaran yang surplus atau defisit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak literatur empiris menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka merupakan faktor utama untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

Tariffs and tariff-rate quotas merupakan pajak terhadap komoditas impor yang masuk kedalam suatu negara merupakan salah satu intervensi pemerintah yang sudah ada cukup lama ada dalam aktivitas perekonomian. Ada dua motif ekonomi dari pengenaan tarif terhadap komoditas import tersebut. Pertama tarif bisa memberikan penerima bagi pemerintah. Kedua tarif juga dapat membantu Perusahaan dan supplier dari industri domestik dalam menghadapi persaingan dari serbuuan barang-barang impor. *Tariff-rate quota* adalah suatu konsep yang menggabungkan pengenaan tarif engan penetapan suatu kuota. *Tariff-Rate Quota (TRQ)* adalah sebuah osep yang menggabungkan pengenaan tarif dengan penetapan suatu kuota. Suatu jenis *Tariff-Rate Quota (TRQ)* biasanya akan mengenakan tingkat tarif yang rendah terhadap sejumlah tertentu yang tetap dari produk impor yang melebihi jumlah yang telah di tentukan di awal. Secara hukum dan berdasarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) negara- negara diijikan Untuk menggunakan dua Jenis tarif dalam format *Tariff-Rate Quota (TRQ)*

Quota jenis hambatan perdagangan lainnya yaitu hambatan perdagangan non tarif dalam bentuk kuota impor secara eksplisit. Kuota impor dulunya sangat sering digunakan dalam perdagangan produk-produk pertanian kuota, pemerintah membatasi secara ketat jumlah barang yang boleh diimpor dengan penentuan jumlah barang yang di produksi. *Voluntary Export Restraint (VER)* hambatan perdagangan non tarif lainnya yang juga cukup sering digunakan dinamakan *Voluntary Export Restaint (VER)* dimana melalui skema negara pengekspor setuju untuk membatasi jumlah ekpornya ke negara pengimpor walaupun dilakukan dengan pembatasan perdagangan yang lebih ketat sehingga VER akan memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui harga produk ekspor mereka yang lebih tinggi di pasar negara pengimpor. Dumping yang merupakan hambatann yang bersifat tarif yang akan menimbulkan salah satu dampak pemberlakuan diskriminalitas harga dalam pasar domestik negara importir. Pemberlakuan diskriminasi harga semisal pemberlakuan harga lebih rendah terhadap barang ekspor dijual ke

pasaran asing negara pengimpor, di bandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasaran merupakan bentuk dasar praktek dumping

Pertumbuhan impor dan ekspor dan neraca perdagangan bilateral (Dai et al., 2016)

yaitu:

1. Membangun model pertumbuhan impor dan ekspor di bawah Tekanan Lingkungan Negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan untuk mengontrol impor dan ekspor, dan ditujukan pada isu-isu seperti sumber daya yang terbatas, polusi, keresahan sosial, bencana alam dan risiko ekonomi akibat perdagangan internasional (Dai et al., 2016).

2. Impor dan ekspor yang optimal. Menggunakan model impor dan ekspor di bawah Tekanan Lingkungan, dengan layanan optimal serta batasan ekspor dan batas impor dengan inovasi yang tumbuh secara bertahap. (Dai et al., 2016).

3. Membangun jalur kebijakan perdagangan antar negara (Dai et al., 2016).